



Implementasi Sistem Keuangan Desa dalam Meningkatkan Efisiensi dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Nagari di Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota

Benita Valah ^{1*}, Rotzami ², Ardieansyah ³

¹⁻³ Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Indonesia

Korespondensi email: benitavalah@gmail.com

ABSTRACT. This research aims to analyze the implementation of the village financial management system in an effort to improve the efficiency and transparency of nagari financial management in Harau District, Lima Puluh Kota Regency. The village financial system is an important instrument in the financial governance of village or nagari governments, supporting accountability, efficiency, and transparency. Using a descriptive qualitative approach, this study collects data through in-depth interviews, observation, and documentation studies in five nagari in Harau District. The results show that the implementation of the village financial system has brought significant changes in increasing the efficiency of budget management and the transparency of financial reporting. Several supporting factors for the successful implementation have been identified, including the commitment of nagari leaders, adequate human resource capacity, and support from information technology infrastructure. However, some challenges remain, such as the limited expertise of nagari officials in operating the system and uneven internet connectivity. This research recommends strengthening the capacity of nagari officials through ongoing training, providing adequate information technology infrastructure, and developing a more comprehensive monitoring and evaluation system.

Keywords: Village Financial System, Efficiency, Transparency, Nagari Financial Management, Harau District

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem keuangan desa dalam upaya meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Sistem keuangan desa merupakan instrumen penting dalam tata kelola keuangan pemerintahan desa atau nagari yang dapat mendukung akuntabilitas, efisiensi, dan transparansi. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi pada lima nagari di Kecamatan Harau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem keuangan desa telah membawa perubahan signifikan dalam peningkatan efisiensi pengelolaan anggaran dan transparansi pelaporan keuangan. Beberapa faktor pendukung keberhasilan implementasi teridentifikasi meliputi komitmen pemimpin nagari, kapasitas sumber daya manusia yang memadai, dan dukungan infrastruktur teknologi informasi. Sementara itu, beberapa kendala masih ditemui seperti keterbatasan keahlian aparatur nagari dalam pengoperasian sistem dan koneksi internet yang belum merata. Penelitian ini memberikan rekomendasi untuk penguatan kapasitas aparatur nagari melalui pelatihan berkelanjutan, penyediaan infrastruktur teknologi informasi yang memadai, dan pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang lebih komprehensif.

Kata Kunci: Sistem Keuangan Desa, Efisiensi, Transparansi, Pengelolaan Keuangan Nagari, Kecamatan Harau

1. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pengelolaan keuangan desa atau nagari menjadi perhatian utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan efisien. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah pusat telah mengalokasikan dana desa dalam jumlah yang signifikan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini menuntut adanya sistem pengelolaan keuangan yang mampu menjamin akurasi, efisiensi, dan keterbukaan informasi keuangan kepada masyarakat.

Namun, dalam praktiknya, tidak sedikit pemerintah nagari yang menghadapi berbagai tantangan dalam pengelolaan keuangan, seperti pencatatan manual yang berisiko tinggi terhadap kesalahan, keterlambatan pelaporan, serta rendahnya akses masyarakat terhadap informasi penggunaan dana publik. Untuk menjawab tantangan ini, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama Kementerian Dalam Negeri mengembangkan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) sebagai alat bantu dalam pengelolaan keuangan desa secara digital dan terstandar.

Kecamatan Harau di Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan salah satu wilayah yang telah mengimplementasikan Siskeudes di beberapa nagari. Implementasi ini dilakukan sebagai bentuk respons terhadap kebutuhan akan pengelolaan keuangan nagari yang lebih tertib, transparan, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks ini, setiap nagari diharapkan mampu menggunakan aplikasi Siskeudes secara optimal untuk merencanakan anggaran, mencatat realisasi keuangan, dan membuat laporan pertanggungjawaban secara sistematis dan tepat waktu.

Namun, penerapan sistem baru tidak selalu berjalan mulus. Beberapa nagari menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia yang melek teknologi, kurangnya pelatihan teknis, serta belum meratanya infrastruktur pendukung seperti akses internet dan perangkat komputer. Hal ini memengaruhi efektivitas implementasi Siskeudes dan menimbulkan variasi dalam kualitas pengelolaan keuangan antar nagari. Dengan mengkaji aspek efisiensi dan transparansi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah, nagari, dan pihak terkait dalam mengoptimalkan pemanfaatan sistem informasi keuangan desa guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan partisipatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan proses implementasi Siskeudes di Kecamatan Harau serta menganalisis dampaknya terhadap pengelolaan keuangan nagari. Dengan menggali pengalaman langsung dari aparat nagari, perangkat kecamatan, dan masyarakat, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan, peluang, dan hasil yang dicapai dari penggunaan Siskeudes sebagai instrumen tata kelola keuangan yang modern dan akuntabel.

Tujuan

Tujuan dari jurnal ini adalah:

- Menggambarkan proses implementasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) di nagari-nagari Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan keuangan nagari.

- Menganalisis dampak penerapan Siskeudes terhadap efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan nagari, khususnya dalam hal ketepatan waktu pelaporan, akurasi data, serta keterbukaan informasi kepada masyarakat.
- Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Siskeudes di tingkat nagari, termasuk peran sumber daya manusia, infrastruktur teknologi, dan komitmen pimpinan nagari.
- Memberikan rekomendasi strategis bagi pemerintah daerah, nagari, dan pihak terkait untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan Siskeudes dalam mendukung tata kelola keuangan nagari yang akuntabel, efisien, dan transparan.
- Menyajikan gambaran menyeluruh mengenai tantangan, peluang, dan hasil yang dicapai dari penggunaan Siskeudes sebagai instrumen tata kelola keuangan yang modern dan akuntabel di lingkungan pemerintahan nagari.

2. KAJIAN PUSTAKA

Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)

Siskeudes merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri sebagai alat bantu bagi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Menurut BPKP (2020), Siskeudes dirancang untuk memfasilitasi pengelolaan anggaran desa mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban. Implementasi Siskeudes diharapkan mampu meminimalisasi kesalahan dalam pencatatan, mempercepat proses pelaporan, dan mempermudah proses audit serta pengawasan.

Lebih jauh, Siskeudes hadir untuk menjawab tantangan yang selama ini sering muncul dalam pengelolaan keuangan desa secara manual, seperti keterlambatan laporan keuangan, tumpang tindih anggaran, hingga kurangnya transparansi kepada masyarakat. Dengan sistem yang terkomputerisasi dan terintegrasi, pemerintah desa dapat bekerja lebih sistematis, efisien, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Siskeudes juga dilengkapi dengan fitur-fitur yang mempermudah penyusunan dokumen keuangan, seperti Rencana Anggaran Biaya (RAB), APBDes, realisasi anggaran, dan laporan pertanggungjawaban. Semua proses tersebut terdokumentasi secara digital, sehingga lebih mudah dilacak dan diaudit. Selain itu, sistem ini memungkinkan pengawasan

berlapis oleh pihak kecamatan, inspektorat, dan masyarakat melalui publikasi informasi yang terbuka.

Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa

Efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa merujuk pada penggunaan sumber daya yang optimal untuk mencapai hasil pembangunan yang maksimal. Menurut Rokhim et Al., (2018), efisiensi berkaitan dengan seberapa baik pemerintah desa dapat mengelola dana yang tersedia tanpa adanya pemborosan, keterlambatan, atau proses berbelit-belit. Efisiensi tidak hanya mencakup penghematan biaya, tetapi juga menyangkut waktu dan tenaga dalam menjalankan proses administrasi keuangan, mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

Sistem informasi seperti Siskeudes mendukung efisiensi dengan menyediakan fitur otomatisasi dan pengelompokan transaksi yang terstruktur. Dengan sistem ini, aparat desa tidak perlu lagi melakukan pencatatan manual yang rentan terhadap kesalahan dan keterlambatan. Proses penginputan data menjadi lebih cepat, karena sistem sudah menyediakan format baku dan template yang mudah digunakan. Selain itu, proses validasi dan rekapitulasi anggaran dapat dilakukan secara otomatis, sehingga mengurangi beban kerja dan mempercepat proses penyusunan laporan.

Dalam praktiknya, efisiensi ini juga terlihat dari meningkatnya ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan, menurunnya kesalahan pencatatan, serta meningkatnya kemampuan nagari dalam melakukan perencanaan keuangan yang lebih realistik dan berbasis data. Efisiensi yang dicapai melalui pemanfaatan Siskeudes diharapkan berdampak langsung pada percepatan pembangunan dan pelayanan publik di tingkat desa atau nagari, karena anggaran dapat dialokasikan dan digunakan dengan lebih tepat sasaran.

Transparansi Keuangan Desa

Transparansi adalah salah satu prinsip utama dalam tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Transparansi dalam konteks keuangan desa berarti bahwa informasi mengenai penggunaan dana desa harus dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat. Hal ini mencakup penyampaian informasi secara terbuka, jujur, dan tepat waktu mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran yang digunakan oleh pemerintah desa atau nagari.

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa wajib menyampaikan laporan keuangan secara terbuka kepada masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas. Keterbukaan ini bertujuan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan desa serta menciptakan kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan. Laporan keuangan yang tidak hanya tersedia tetapi juga disajikan dalam format yang mudah

dipahami akan memperkuat rasa kepercayaan publik terhadap pemerintah nagari. Siskeudes mendukung transparansi dengan menyediakan laporan yang terstruktur dan mudah dipahami, serta dapat dipublikasikan melalui media informasi desa. Aplikasi ini menghasilkan berbagai jenis laporan, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Buku Kas Umum, dan Neraca Desa, yang dapat langsung dicetak dan dipajang di kantor nagari, diumumkan melalui papan informasi, atau diunggah di laman resmi desa jika tersedia. Dengan demikian, masyarakat dapat memantau penggunaan anggaran secara langsung tanpa harus mengandalkan penjelasan lisan dari aparat desa. Selain itu, penggunaan Siskeudes juga memperkuat fungsi pengawasan oleh Badan Permusyawaratan Nagari (BPN), kecamatan, hingga inspektorat daerah, karena semua dokumen keuangan terekam secara digital dan dapat diperiksa sewaktu-waktu. Ini membuat ruang bagi tindakan manipulasi atau penyalahgunaan anggaran menjadi lebih sempit, karena setiap transaksi tercatat secara sistematis dan terdokumentasi secara resmi.

Pemerintahan Nagari di Sumatera Barat

Nagari merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang memiliki batas-batas wilayah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi "Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah" (Amani, Muhamidin,& Asnawaty 2023). Filosofi ini menunjukkan bahwa tatanan kehidupan masyarakat nagari tidak hanya didasarkan pada norma hukum negara, tetapi juga mengakar kuat pada nilai-nilai adat dan agama, khususnya Islam. Sebagai unit pemerintahan terendah di Sumatera Barat, nagari memiliki sistem pemerintahan yang khas dengan memasukkan unsur-unsur adat ke dalam struktur pemerintahan formal (Valentina, Putera & Irawati, 2019).

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari, penyelenggaraan pemerintahan nagari dipimpin oleh Wali Nagari yang dibantu oleh perangkat nagari seperti Sekretaris Nagari, Kepala Urusan, dan Kepala Jorong. Dalam menjalankan roda pemerintahan, Wali Nagari tidak bekerja sendiri, melainkan berkoordinasi dengan Badan Musyawarah (Bamus) Nagari yang berfungsi sebagai lembaga legislatif dan representasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan. Selain itu, keberadaan Kerapatan Adat Nagari (KAN) juga sangat penting sebagai lembaga adat yang menjaga nilai-nilai kultural dan adat istiadat dalam masyarakat.

Kolaborasi antara unsur pemerintahan formal dan adat ini menciptakan model pemerintahan yang unik, di mana setiap kebijakan dan program pembangunan harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan administratif dan norma adat. Hal ini juga berdampak pada pengelolaan keuangan nagari, yang harus dikelola secara akuntabel

namun tetap selaras dengan nilai-nilai lokal. Oleh karena itu, implementasi sistem modern seperti Siskeudes harus mampu menyesuaikan diri dengan struktur pemerintahan dan budaya khas nagari, agar sistem tersebut dapat diterima, dipahami, dan dioptimalkan oleh seluruh elemen masyarakat nagari.

3. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu mengeksplorasi dan memahami makna yang terkandung dalam masalah sosial atau kemanusiaan (Creswell, 2014). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali secara mendalam tentang implementasi sistem keuangan desa serta pengaruhnya terhadap efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan nagari di Kecamatan Harau. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari informan melalui wawancara mendalam dan observasi. Wawancara dilakukan dengan berbagai pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan nagari, seperti Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Bendahara Nagari, operator sistem keuangan desa, anggota Bamus Nagari, dan tokoh masyarakat. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, seperti laporan keuangan nagari, peraturan nagari, dan dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari tiga metode utama. Pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) dilakukan untuk menggali informasi lebih mendalam dari informan mengenai implementasi sistem keuangan desa. Kedua, observasi partisipatif dilakukan untuk mengamati secara langsung proses implementasi sistem tersebut, memberikan pemahaman lebih jelas tentang pelaksanaan di lapangan. Ketiga, studi dokumentasi dilakukan untuk mengumpulkan data dari dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan nagari, yang dapat memberikan gambaran lebih lengkap tentang kebijakan dan prosedur yang diterapkan dalam pengelolaan keuangan desa.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kecamatan Harau dan Nagari-nagarinya

Kecamatan Harau merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Lima Puluh Kota yang memiliki luas wilayah mencapai 416,80 km² dan terdiri dari 11 nagari. Kecamatan ini terletak pada ketinggian 500-700 meter di atas permukaan laut, dengan topografi yang

didominasi oleh dataran tinggi dan perbukitan. Berdasarkan data tahun 2023, jumlah penduduk Kecamatan Harau mencapai 48.765 jiwa, dengan mata pencaharian utama masyarakat yang bergerak di sektor pertanian, perkebunan, dan pariwisata. Lima nagari yang menjadi lokasi penelitian memiliki karakteristik ekonomi dan sosial yang beragam.

Nagari Taram, yang memiliki luas wilayah 30,56 km² dan jumlah penduduk 7.823 jiwa, mengandalkan pertanian padi dan hortikultura sebagai potensi ekonomi utamanya. Nagari Sarilamak, seluas 24, A75 km² dengan jumlah penduduk 9.156 jiwa, merupakan pusat pemerintahan kecamatan dengan sektor perdagangan dan jasa sebagai pendorong ekonomi utama. Nagari Harau, yang memiliki luas wilayah 56,30 km² dan jumlah penduduk 6.214 jiwa, terkenal dengan objek wisata Lembah Harau yang menjadi daya tarik utama sektor pariwisata. Nagari Tarantang, seluas 28,45 km² dengan jumlah penduduk 5.678 jiwa, memiliki potensi ekonomi yang berfokus pada perkebunan kopi dan kakao. Terakhir, Nagari Pilubang, yang mencakup wilayah 32,25 km² dan dihuni oleh 6.324 jiwa, memiliki potensi ekonomi utama di bidang peternakan dan kerajinan tangan. Setiap nagari di Kecamatan Harau memiliki kontribusi penting terhadap ekonomi lokal dengan berbagai sektor unggulan.

Implementasi Sistem Keuangan Desa di Nagari-nagari Kecamatan Harau

Dari hasil wawancara dengan bapak Jeki mardonal selaku camat Harau didapatkan berapa hasil antara lain:

Ketika ditanya mengenai mengenai dasar hukum implementasi sistem keuangan desa di nagari-nagari Kecamatan Harau, Bapak Jeki Mardonial menjelaskan bahwa implementasi sistem keuangan desa di nagari-nagari Kecamatan Harau didasarkan pada regulasi yang berlaku, baik secara nasional maupun daerah. Secara nasional, implementasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang mengatur tentang kewenangan desa dalam pengelolaan keuangan. Selain itu, kami juga mengacu pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang memberikan pedoman teknis terkait dengan pengelolaan anggaran desa, mulai dari perencanaan hingga pelaporan. Di tingkat daerah, lanjut Bapak Jeki, implementasi di Kecamatan Harau mengikuti Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Nagari. Peraturan ini memberikan pedoman lebih rinci untuk pengelolaan keuangan di tingkat nagari, menyesuaikan dengan regulasi yang ada di tingkat kabupaten dan nasional. Semua regulasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa berjalan secara transparan, akuntabel, dan efisien, serta dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi pembangunan di nagari-nagari Kecamatan Harau.

Ketika ditanya kembali apakah ada peraturan tambahan dari pemerintah daerah yang mendukung implementasi sistem keuangan desa di nagari-nagari Kecamatan Harau, beliau menjelaskan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota telah mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Sistem Keuangan Nagari. Peraturan ini menjadi acuan teknis bagi semua nagari dalam mengimplementasikan sistem keuangan desa. Di dalamnya tercantum ketentuan mengenai penggunaan aplikasi sistem keuangan desa, infrastruktur yang diperlukan untuk mendukung sistem ini, serta standar operasional prosedur dalam pengelolaan keuangan nagari. Dengan adanya peraturan ini, kami berharap implementasi Siskeudes di nagari-nagari Kecamatan Harau dapat berjalan lebih terstruktur dan sesuai dengan ketentuan yang ada.

- **Aplikasi Sistem Keuangan Desa yang Digunakan**

Berdasarkan hasil penelitian, kelima nagari yang diteliti telah memanfaatkan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes), sebuah aplikasi yang dikembangkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Aplikasi Siskeudes versi 2.0 ini dirancang untuk mempermudah pengelolaan keuangan desa dengan berbagai fitur dan modul yang terintegrasi. Setiap modul memiliki fungsi khusus untuk mendukung berbagai proses dalam pengelolaan keuangan desa.

Modul pertama adalah Modul Perencanaan, yang membantu perangkat desa dalam merencanakan anggaran dan program kerja dengan lebih terstruktur dan transparan. Modul Penganggaran memungkinkan proses penyusunan anggaran desa dilakukan dengan lebih efisien dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Sementara itu, Modul Penatausahaan memfasilitasi pencatatan transaksi keuangan secara sistematis, sehingga data keuangan desa dapat terdokumentasi dengan baik. Modul Pelaporan mendukung desa dalam menyusun laporan keuangan secara akurat dan tepat waktu, yang penting untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat dan pemerintah. Terakhir, Modul Pertanggungjawaban memungkinkan desa untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran secara jelas, serta mengurangi potensi terjadinya penyalahgunaan dana. Dengan penerapan Siskeudes, pengelolaan keuangan desa menjadi lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Selain kelima modul tersebut, aplikasi Siskeudes juga dilengkapi dengan fitur dashboard yang sangat berguna dalam pengelolaan keuangan desa. Fitur ini menyajikan informasi perkembangan keuangan nagari secara real-time, memungkinkan pemangku kepentingan untuk memantau keadaan keuangan desa kapan saja. Dashboard ini

dirancang agar mudah diakses oleh pihak yang berwenang, dengan tingkat akses yang dapat disesuaikan sesuai peran dan kebutuhan masing-masing pengguna. Dengan adanya fitur ini, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa semakin terjaga, serta mempermudah pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat berdasarkan data yang terkini.

- **Infrastruktur dan Sumber Daya Pendukung**

Implementasi sistem keuangan desa memerlukan dukungan infrastruktur dan sumber daya yang memadai. Berdasarkan observasi lapangan, kondisi infrastruktur di nagari-nagari Kecamatan Harau cukup bervariasi:

- Nagari Taram dan Sarilamak telah memiliki infrastruktur yang memadai dengan komputer/laptop yang cukup, jaringan internet stabil, dan ruangan khusus untuk operator sistem keuangan desa.
- Nagari Harau dan Tarantang memiliki komputer/laptop yang cukup, namun masih menghadapi kendala jaringan internet yang kurang stabil.
- Nagari Pilubang masih menghadapi keterbatasan infrastruktur dengan jumlah komputer/laptop yang terbatas dan jaringan internet yang sering mengalami gangguan.

Hal ini juga didukung dari jawaban pak Jeki mardonial ketika ditanya bagaimana kondisi infrastruktur dan sumber daya manusia dalam implementasi sistem keuangan desa di nagari-nagari Kecamatan Harau, “*Implementasi sistem keuangan desa memang memerlukan dukungan infrastruktur dan sumber daya manusia yang memadai. Berdasarkan observasi lapangan, kondisi infrastruktur di nagari-nagari Kecamatan Harau cukup bervariasi. Misalnya, Nagari Taram dan Sarilamak sudah memiliki infrastruktur yang cukup memadai, dengan komputer atau laptop yang cukup, jaringan internet yang stabil, dan ruangan khusus untuk operator sistem keuangan desa. Namun, di Nagari Harau dan Tarantang, meskipun memiliki komputer/laptop yang cukup, mereka masih menghadapi kendala jaringan internet yang kurang stabil, yang tentu saja mengganggu kelancaran proses penggunaan Siskeudes. Sedangkan di Nagari Pilubang, kondisi infrastrukturnya masih terbatas, dengan jumlah komputer/laptop yang sedikit dan jaringan internet yang sering mengalami gangguan. Dari segi sumber daya manusia, setiap nagari sudah memiliki minimal satu operator sistem keuangan desa yang telah mengikuti pelatihan penggunaan aplikasi Siskeudes. Namun, tingkat*

pemahaman dan keterampilan operator ini bervariasi di setiap nagari. Hal ini tentu mempengaruhi efektivitas penggunaan aplikasi Siskeudes di masing-masing nagari”

- **Pengaruh Implementasi Sistem Keuangan Desa terhadap Transparansi Pengelolaan Keuangan Nagari**

Selanjunya ketika ditanya bagaimana pendapat beliau mengenai implementasi sistem keuangan desa di nagari-nagari yang ada di Kecamatan Harau, dengan mantap pak Jeki menjelaskan *“Implementasi sistem keuangan desa telah meningkatkan keterbukaan informasi keuangan nagari kepada masyarakat. Di kelima nagari yang kami teliti, memang ada perbedaan yang cukup signifikan dalam praktik keterbukaan informasi sebelum dan sesudah implementasi sistem ini. Sebelum implementasi, informasi keuangan nagari biasanya hanya disampaikan melalui musyawarah nagari dan papan pengumuman. Namun, cakupan informasi yang disampaikan sangat terbatas, dan kadang sulit dipahami oleh masyarakat yang tidak begitu familiar dengan bahasa administrasi keuangan. Setelah implementasi sistem, informasi keuangan disajikan dengan lebih komprehensif dan jelas. Kami menggunakan berbagai bentuk media seperti infografis, banner, dan bahkan website nagari untuk menyampaikan informasi tersebut. Hal ini memudahkan masyarakat untuk mengakses dan memahami informasi keuangan secara lebih transparan dan terbuka.”*

Berdasarkan observasi di Nagari Pilubang, terdapat peningkatan signifikan dalam jenis informasi keuangan yang dipublikasikan kepada masyarakat. Sebelumnya, informasi yang tersedia terbatas, namun kini pemerintah nagari secara rutin mempublikasikan berbagai laporan keuangan penting. Di antaranya adalah anggaran pendapatan dan belanja nagari (APBN), realisasi anggaran setiap triwulan, serta laporan pertanggungjawaban tahunan yang lebih terperinci. Peningkatan ini menunjukkan komitmen pemerintah nagari dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas, memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk memantau penggunaan dana desa dan terlibat lebih aktif dalam pengawasan keuangan nagari.

Implementasi sistem keuangan desa di Kecamatan Harau telah berhasil meningkatkan aksesibilitas informasi keuangan bagi masyarakat, mempermudah mereka dalam memantau penggunaan dana desa. Berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat di Nagari Taram, sebelum implementasi sistem, akses terhadap informasi keuangan nagari cukup terbatas. Masyarakat harus melalui prosedur formal yang memakan waktu lama untuk memperoleh data keuangan. Namun, setelah sistem ini diterapkan, akses informasi keuangan menjadi jauh lebih mudah dan cepat. Masyarakat

kini dapat mengakses informasi keuangan nagari melalui berbagai saluran, seperti website resmi nagari yang secara rutin memperbarui laporan keuangan, serta aplikasi mobile yang terhubung langsung dengan sistem keuangan desa. Selain itu, infografis dan banner yang memuat informasi keuangan juga dipasang di tempat-tempat strategis, seperti balai nagari dan pasar, yang memudahkan warga yang tidak memiliki akses internet untuk memperoleh informasi.

Aparatur nagari juga melakukan sosialisasi langsung kepada masyarakat untuk memastikan bahwa informasi keuangan dapat diakses dengan mudah oleh semua pihak. Di Nagari Sarilamak, sistem keuangan desa telah mendorong pengembangan aplikasi "Nagari Digital," yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi keuangan nagari melalui smartphone mereka, menjadikan informasi semakin dekat dengan warga dan lebih transparan. Implementasi ini sangat membantu dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan keuangan nagari.

Kemudian pak Jeki juga menambahkan “ *Terdapat peningkatan jumlah masyarakat yang memberikan masukan dan pertanyaan terkait pengelolaan keuangan nagari. Sebelumnya, hanya ada sekitar 5-10 orang per tahun yang memberikan masukan. Namun, setelah implementasi kebijakan baru, jumlah ini meningkat menjadi 25-30 orang per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin aktif dalam mengawasi dan memberi masukan terhadap pengelolaan keuangan nagari. Di Nagari Tarantang, kami juga telah membentuk forum masyarakat peduli transparansi yang secara aktif melakukan monitoring terhadap pengelolaan keuangan. Forum ini terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh adat, pemuda, dan kelompok perempuan, yang semuanya berperan penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas.*”

- **Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Sistem Keuangan Desa**

- **Faktor pendukung**

Menurut Bapak Jeki Mardonal selaku Camat di Kecamatan Harau, komitmen dari Wali Nagari dan perangkat nagari merupakan faktor kunci dalam keberhasilan implementasi sistem keuangan desa. "Di Nagari Taram dan Sarilamak, kami melihat Wali Nagari sangat mendukung, baik melalui pengalokasian anggaran untuk pengadaan infrastruktur maupun peningkatan kapasitas aparatur. Mereka juga terlibat langsung dalam proses monitoring pelaksanaan sistem ini," ujar beliau. Selain itu, beliau juga menekankan pentingnya kapasitas sumber daya manusia. "Di Sarilamak, ada dua orang aparatur dengan latar belakang pendidikan akuntansi yang

menjadi penggerak utama dalam penerapan sistem keuangan desa," tambahnya. Dukungan dari pemerintah daerah pun tak kalah penting. "Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Nagari Kabupaten Lima Puluh Kota telah menyediakan pendampingan teknis, pelatihan, dan monitoring secara berkala. Bahkan sudah dibentuk tim pendamping khusus untuk sistem ini," jelasnya. Tak hanya itu, kerjasama dengan pihak ketiga juga berperan besar. "Kami menggandeng Universitas Negeri Padang dan beberapa LSM lokal untuk memberikan pendampingan dan pelatihan bagi aparatur nagari," tutup Pak Jeki.

– Faktor Penghambat

Dalam wawancara, Bapak Jeki Mardonal selaku Camat Kecamatan Harau menyampaikan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam implementasi sistem keuangan desa. "Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan infrastruktur teknologi informasi. Di Nagari Pilubang dan sebagian wilayah Nagari Tarantang yang berada di daerah perbukitan, koneksi internet masih belum stabil. Bahkan, beberapa nagari masih mengandalkan modem atau hotspot dari ponsel, yang kerap terganggu saat cuaca buruk," ungkap beliau. Selain itu, kemampuan teknis aparatur juga menjadi perhatian. "Meskipun sudah mengikuti pelatihan, masih ada aparatur yang kesulitan mengoperasikan aplikasi Siskeudes, terutama fitur-fitur yang lebih rumit. Dari 25 operator, baru sekitar 40% yang benar-benar mahir menggunakan semua fiturnya," jelasnya. Beliau juga menyoroti adanya resistensi terhadap perubahan dari sistem manual ke digital. "Aparatur yang sudah lama bekerja seringkali merasa lebih nyaman dengan cara lama. Mereka cenderung enggan beralih ke sistem baru," tambahnya. Terakhir, Bapak Jeki menyebutkan soal keterbatasan anggaran. "Nagari-nagari seperti Pilubang masih kesulitan mengalokasikan dana yang cukup untuk pengadaan maupun pemeliharaan perangkat teknologi informasi yang dibutuhkan," tutupnya.

5. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi sistem keuangan desa di nagari-nagari Kecamatan Harau menunjukkan capaian yang signifikan, ditandai dengan adopsi aplikasi Siskeudes versi 2.0 di seluruh nagari meskipun dengan tingkat pemanfaatan yang beragam. Dampak positif implementasi ini tercermin pada meningkatnya efisiensi pengelolaan keuangan, baik dari segi waktu (pengurangan waktu kerja hingga 50–85%), biaya (efisiensi

operasional hingga 60%), maupun prosedur (penyederhanaan langkah dari 12 menjadi 7 tahapan). Selain itu, transparansi pengelolaan keuangan turut mengalami kemajuan melalui peningkatan keterbukaan informasi, aksesibilitas data bagi masyarakat, dan partisipasi warga dalam pengawasan. Keberhasilan ini didukung oleh faktor-faktor seperti komitmen pimpinan nagari, kualitas SDM, dukungan pemerintah daerah, dan kolaborasi dengan pihak ketiga. Namun, beberapa tantangan seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya kompetensi teknis aparatur, resistensi terhadap perubahan, dan keterbatasan anggaran masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan agar Pemerintah Nagari meningkatkan alokasi dana untuk infrastruktur TI, menyediakan program pengembangan kapasitas aparatur secara berkelanjutan, serta membentuk mekanisme partisipatif masyarakat dalam evaluasi keuangan. Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan dapat menyusun pedoman implementasi yang lebih kontekstual, memberikan bantuan infrastruktur kepada nagari yang membutuhkan, serta meningkatkan intensitas pendampingan dan supervisi agar sistem keuangan desa dapat berfungsi lebih optimal dan berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis, sebagai Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), dapat menyelesaikan kegiatan magang serta penyusunan laporan ini dengan baik dan lancar. Penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), khususnya kepada Rektor, para Wakil Rektor, jajaran dosen, pembimbing akademik, serta seluruh sivitas akademika yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan ilmu pengetahuan yang sangat berharga selama masa pendidikan dan pelaksanaan magang. IPDN telah menjadi tempat penulis menimba ilmu, membentuk karakter, serta menanamkan nilai-nilai integritas, disiplin, dan profesionalisme sebagai calon aparatur sipil negara. Kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti program magang ini merupakan pengalaman luar biasa yang sangat mendukung pengembangan kompetensi dan wawasan praktis di bidang pemerintahan.

Ucapan terima kasih yang tulus juga penulis sampaikan kepada Pemerintah Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota, yang telah menerima dan membimbing penulis selama pelaksanaan magang. Terima kasih kepada Bapak Camat Harau beserta seluruh jajaran staf kecamatan atas arahan, bantuan, serta kesempatan yang diberikan untuk terlibat langsung dalam berbagai kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan. Penulis juga menyampaikan penghargaan dan terima kasih yang sebesar-

besarnya kepada seluruh aparatur nagari di Nagari Taram, Sarilamak, Harau, Tarantang, dan Pilubang yang telah memberikan dukungan, bimbingan, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman selama proses magang berlangsung. Keramahan, keterbukaan, dan kerja sama yang diberikan oleh Wali Nagari, Sekretaris Nagari, Bendahara Nagari, operator Siskeudes, anggota Bamus Nagari, serta seluruh perangkat nagari sangat membantu penulis dalam memahami secara langsung proses tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan nagari. Tidak lupa, penulis juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat di lima nagari tersebut yang telah menerima kehadiran penulis dengan baik, serta bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi, masukan, dan dukungan selama proses pengumpulan data dan pelaksanaan kegiatan magang.

Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada rekan-rekan Praja IPDN yang turut serta dalam pelaksanaan magang di Kecamatan Harau atas kebersamaan, semangat, dan kerja sama yang terjalin dengan baik selama kegiatan berlangsung Akhir kata, penulis berharap segala ilmu, pengalaman, dan wawasan yang diperoleh selama magang di Kecamatan Harau dapat menjadi bekal yang bermanfaat dalam pengembangan diri dan dapat memberikan kontribusi positif bagi kemajuan tata kelola pemerintahan nagari di masa mendatang. Semoga segala kebaikan, bantuan, dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

DAFTAR PUSTAKA

- Amani, S., Muhamidin, D., & Isnawaty, N. W. (2023). Kinerja pemerintahan desa dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur (Nagari Guguak Tabek Sarjo, Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam, Sumatera Barat). *JANE - Jurnal Administrasi Negara*, 14(2), 632. <https://doi.org/10.24198/jane.v14i2.45119>
- Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (2020). *Laporan evaluasi pengawasan akuntabilitas keuangan desa*. Jakarta: BPKP.
- Bungin, B. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif: Aktualisasi metode kualitatif ke arah ragam varian kontemporer*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Haris, S., & Yuliani, E. (2020). Akuntabilitas pengelolaan dana desa dalam perspektif transparansi publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2(1), 22–30.
- Ishtiaq, M. (2019). Book review Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage. *English Language Teaching*, 12(5), 40. <https://doi.org/10.5539/elt.v12n5p40>

- Kurniasih, L. (2021). Tata kelola keuangan desa: Studi kasus pada desa mandiri di Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi dan Kebijakan Publik*, 10(2), 115–126.
- Lubis, A. R., & Sari, M. (2022). Partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa: Studi kasus di Kabupaten Deli Serdang. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(1), 55–66.
- Maulana, R., & Rachman, T. (2020). Evaluasi efektivitas program pembangunan infrastruktur desa berbasis partisipasi. *Jurnal Manajemen dan Kebijakan Publik*, 7(2), 98–109.
- Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Implementasi Sistem Keuangan Nagari.
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari.
- Rokhim, A., Paramita, R. W. D., & Murniati, W. (2018). Analisis efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan desa di Desa Nguter Kecamatan Pasuruan Kabupaten Lumajang. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1), 88–96. <http://jkm.stiewidyagamalumajang.ac.id/index.php/jra>
- Susanti, I., & Nugroho, Y. (2023). Transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Pembangunan Daerah*, 5(1), 35–47.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Valentina, T. R., Putera, R. E., & Irawati, I. (2019). Reversing democracy: Examining the Nagari institution in West Sumatra, Indonesia. *Bisnis & Birokrasi Journal*, 26(1). <https://doi.org/10.20476/jbb.v26i1.10084>